

OPTIMALISASI POTENSI DESA: SOSIALISASI KOMPREHENSIF PEMBENTUKAN BUMDes DARI PERSPEKTIF EKONOMI, MANAJEMEN DAN REGULASI HUKUM

Kenedi¹, Faturohman², Irwan Sukmawan³, April Laksana⁴

¹)Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

²)Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

³)Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

⁴)Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

email: 17satriaforbangsa@gmail.com

Abstrak

Desa Dukuh sebagai desa agraris, yang terletak di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik serta potensi yang kaya dan beragam dengan luas wilayah mencapai 371.278 Ha yang terbagi menjadi 6 RW dan 17 RT dengan jumlah penduduk sekitar 4000an jiwa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan sektor informal lainnya, Desa Dukuh memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor baru seperti pariwisata pedesaan, makanan ringan dan layanan jasa komunitas. Pembentukan BUMDes menjadi langkah penting dalam merancang strategi pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pada kegiatan sosialisasi ini bersamaan dengan moment Kuliah Kerja Mahasiswa serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dimana kegiatan yang menjadikan para praktisi dan akademisi memberikan pengabdian untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Pada sosialisasi ini beberapa pemahaman yang disampaikan informasinya dalam pembentukan BUMDes dari aspek ekonomi, manajemen dan regulasi hukum yang ada. Memberikan jalan dan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa Dukuh untuk membuat usaha-usaha yang bisa dibiayai oleh BUMDes.

Kata Kunci: Optimalisasi, Sosialisasi, Bumdes

Abstract

Dukuh Village, located in the Kragilan District of Serang Regency, Banten Province, is an agrarian village with unique geographical and social characteristics and a rich and diverse potential. It covers an area of 371,278 hectares, divided into 6 neighborhood units (RW) and 17 community units (RT), with a population of approximately 4,000 residents. However, this potential has not been fully utilized to improve the standard of living for the village's inhabitants. With most of its population relying on agriculture and other informal sectors for their livelihoods, Dukuh Village has significant opportunities to develop new sectors such as rural tourism, snack food production, and community service offerings. The formation of a Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a crucial step in designing a structured and sustainable development strategy. This socialization event coincides with the Student Work Experience and Community Service program, where practitioners and academics come together to contribute positively to the community. During this socialization, various aspects of BUMDes establishment, including economic, management, and legal regulations, are explained. It aims to provide guidance and assistance to the community in harnessing the existing potential in Dukuh Village to create businesses that can be funded by BUMDes.

Keywords: Optimization, Socialization, BUMDes

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, pembangunan berkelanjutan tidak bisa lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga formal semata. Masyarakat desa, sebagai pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi negara, juga memiliki peran aktif dalam menggali potensi lokal dan mewujudkan kesejahteraan bersama (Hadi, 2020). Salah satu langkah strategis untuk mencapai hal ini adalah melalui pendekatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pendirian BUMDes mewakili implementasi dari wewenang yang dimiliki oleh desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pedoman Pelaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun

2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 yang mengatur mengenai kewenangan desa.

BUMDes adalah bentuk baru dari lembaga ekonomi di tingkat desa yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Fitria, 2020). BUMDes memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai sarana pengelolaan sumber daya alam dan manusia di tingkat desa (Winisudo & Sadewo, 2021). Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, BUMDes mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk berkontribusi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki desa secara berkelanjutan.

Menurut data miskin diperdesaan Provinsi Banten pada tahun 2022 sekitar 247,540 ribu jiwa di Provinsi Banten (Putra et al., 2023), dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di desa, salah satu upaya untuk menumbuhkan usaha ekonomi desa dengan memiliki Badan Usaha Desa. Melihat fungsi strategis dari adanya BUMDes, sudah selayaknya desa didorong untuk memiliki BUMDes, namun faktanya sampai dengan tahun 2020 berdasarkan data dari Kemendes masih ada sekitar 21.000 atau sekitar 18% desa di Indonesia yang masih belum memiliki BUMDes, salah satunya adalah Desa Dukuh.

Desa Dukuh sebagai desa agraris, yang terletak di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik serta potensi yang kaya dan beragam dengan luas wilayah mencapai 371.278 Ha yang terbagi menjadi 6 RW dan 17 RT dengan jumlah penduduk sekitar 4000an jiwa. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan sektor informal lainnya, Desa Dukuh memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor baru seperti pariwisata pedesaan, makanan ringan dan layanan jasa komunitas. Pembentukan BUMDes menjadi langkah penting dalam merancang strategi pengembangan yang terstruktur dan berkelanjutan (Anggraeni, 2016).

Terkait dengan belum dibentuknya BUMDes, Kepala Desa Dukuh Harrys Prayitno menyampaikan ada tiga faktor utama permasalahan yang dihadapi oleh desa, salah satunya adalah kurangnya informasi dan pemahaman yang memadai tentang konsep BUMDes di kalangan masyarakat desa. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat desa cenderung ragu atau enggan untuk mendirikan dan mengelola BUMDes. Faktor berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, pendirian dan pengelolaan BUMDes memerlukan keterampilan manajemen, keuangan, pemasaran, dan berbagai bidang lainnya untuk menjalankan BUMDes dengan efektif. Hal ini kemudian menjadi kendala dalam memulai dan menjaga operasional BUMDes. Faktor terakhir adalah terkait dengan Hukum dan Regulasi, aparat desa dan masyarakat desa belum memahami bagaimana persyaratan hukum, prosedur administratif, dan peraturan terkait pajak atau izin bisnis lokal dalam mendirikan dan mengelola BUMDes.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kegiatan KKM-PkM (Kuliah Kerja Mahasiswa – Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Bina Bangsa terkait sosialisasi potensi desa secara ekonomi, manajemen BUMDes dan regulasi hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi, manfaat, dan tata kelola BUMDes.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi pembentukan BUMDes sudah sering kali dilakukan diberbagai desa di Indonesia, seperti (Sari, Yuniarti, Imastary Tan, Ikhsan Syukri, & S, 2022) yang mengadakan sosialisasi pembentukan BUMDes di Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci dimana metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan pelatihan, diskusi serta tanya jawab, kemudian (Setiono & Dwihandoko, 2019) melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada individu yang terlibat dalam BUMDes dan juga perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan BUMDes dengan berfokus pada institusi keuangan mikro dan perusahaan penyedia air minum di Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya (Susilowati et al., 2021) yang melakukan sosialisasi terkait identifikasi kelengkapan unsur kelembagaan BUMDes Sumber Arto Desa Kenteng dengan metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual menggunakan zoom meeting dan keberlanjutan kegiatan diteruskan dengan komunikasi menggunakan whatsapp, berikutnya adalah (Satoto, Syarif, Noviades, Fitria, & Mushawirya, 2019) melakukan sosialisasi terhadap pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, begitu juga dengan (Nova & Arwanto, 2021) dimana sosialisasi terkait dengan pembentukan BUMDes yang dilakukan di Desa Tinting Boyok, Sekadau, Kalimantan Barat

dengan tahapan kegiatan meliputi pemetaan potensi, sosialisasi BUMDes dan pendampingan. Top of Form Bottom of Form

Dalam sosialisasi pembentukan BUMDes, pendekatan komunikasi yang efektif menjadi kunci sukses. Proses ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga interaksi aktif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat desa, tokoh-tokoh lokal, aparat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya (Fitriyani, Nurmalina, Pebriana, & Suasri, 2018). Dengan menjalin kolaborasi yang kuat, akan tercipta kesadaran bersama akan pentingnya pembentukan BUMDes dalam menggalakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Salah satu tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi pembentukan BUMDes ini adalah menciptakan pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi BUMDes. Masyarakat Desa Dukuh perlu tahu bahwa BUMDes adalah entitas yang dimiliki bersama oleh warga desa dan dapat menjadi instrumen untuk mengelola sumber daya dan potensi desa secara berkelanjutan (Khotimah, 2019) serta manfaat konkret yang akan diperoleh oleh masyarakat jika BUMDes berhasil diimplementasikan dengan baik, seperti peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pengembangan infrastruktur desa (Arindhawati & Utami, 2020).

Dalam menggali potensi desa, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan rencana strategis BUMDes. Serta munculnya pemahaman yang kuat tentang kebutuhan lokal, tren ekonomi, dan peluang bisnis untuk menjadi landasan untuk merancang program-program yang sesuai dengan konteks Desa Dukuh.

METODE

Pelaksanaan kegiatan sosial ini dari beberapa sinergitas beberapa organisasi masyarakat, mitra kerja dan peserta Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa serta perangkat desa (Laksana, 2023). Dimana kegiatan ini menjadi salah satu program yang dilakukan oleh para akademis dan jajaran instansi pemerintah desa dalam mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). Berikut ini skema dari beberapa perencanaan kegiatan sosial yang akan dilakukan oleh beberapa sinergitas akademisi, mahasiswa dan instansi pemerintahan dengan melakukan kolaborasi diantaranya, sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Skema Kegiatan Sosialisasi

Dari skema tersebut merupakan dari rencana kegiatan sosial yang akan dilaksanakan disetiap kegiatan yang berjalan. Adapun masing-masing tahapan dari kegiatan ini pada gambar diatas, yaitu: 1) Perencanaan kegiatan, ditahapan ini dilakukan penentuan objek, tema dan sumber pendanaan; 2) Pelaksanaan kegiatan, ditahapan ini ditentukan lokasi yang akan dilakukan pendistribusian bantuan; 3) Evaluasi kegiatan, tahapan ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan (Amroni et al., 2021). Pada kegiatan ini dilaksanakan bersama oleh kalangan akademisi, praktisi ekonomi serta beberapa aspek kalangan praktisi hukum. Dimana kegiatan tersebut menjadi satu hal penting bagi mereka dalam meelakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) agar memajukan sebuah desa yang patut untuk dikembangkan dalam aspek ekonomi desanya. Kegiatan ini memberikan sinergitas dari berbagai aspek untuk semua instansi dan lapisan masyarakat yang berkolaborasi (Laksana et al., 2022). Melakukan integrasi untuk memberikan fasilitas dan tempat bagi masyarakat dengan memberikan akomodasi yang diberikan oleh Universitas (Saepulloh & Laksana, 2022).

Tabel 1. Sosialisasi Komprehensif Pembentukan BUMDes

No.	Pemateri	Instansi
1.	Kenedi, SE.,ME	Dosen Universitas Bina Bangsa
2.	Faturohman, SH., MH	Dosen Universitas Bina Bangsa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kegiatan

Pendidikan dan Pembelajaran berbasis aksi Kuliah Kerja Mahasiswa dan pengabdian masyarakat merupakan pendekatan pembelajaran berbasis aksi di mana mahasiswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah dan menghadapi tantangan riil di lapangan (Laksana, 2023). Mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa, mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk menjadi peran dalam segala masalah dan memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah (Masriyadi et al., 2023). Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang mereka pelajari di kampus dan mendapatkan pengalaman praktis yang berharga. Selain itu, interaksi dengan mitra masyarakat juga membuka kesempatan untuk belajar dari kearifan lokal dan realitas sosial yang berbeda. Manfaat sosial dan dampak Positif kolaborasi Kuliah Kerja Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat bersama mitra membawa manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat. Proyek-proyek sosial seperti kepemilikan Badan Usaha Desa yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu kritis. Selain itu, hasil kolaborasi ini dapat menciptakan dampak jangka panjang, termasuk perubahan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sinergi potensi dan sumber daya secara kolaborasi antara kuliah kerja mahasiswa dan pengabdian masyarakat menciptakan sinergi potensi dan sumber daya antara mahasiswa, Perguruan Tinggi dan mitra dari masyarakat atau lembaga. Untuk memberikan pengetahuan yang akan menjadi modal masyarakat desa dalam optimalisasi memiliki BUMDes di desa Dukuh-Kragilan Kabupaten Serang.

Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa tahap sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, adanya observasi atau pengamatan yang dilakukan, bertujuan untuk mahasiswa dan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat tepat sasaran (Thalib et al., 2022). Dimana bagi akademisi dosen dan mahasiswa melakukan sosialisasi akan pentingnya memiliki BUMDes bagi kedepannya masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi desa dengan beberapa usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa untuk kepentingan bersama.

Tabel 2. Kegiatan Penyuluhan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat	Kolaborasi Mitra	Sasaran
1.	Sosialisasi Komprehensif Pembentukan Bumdes Dari Perspektif Ekonomi, Manajemen Dan Regulasi Hukum	1 Hari	Kantor Desa Dukuh	Pemerintah Desa, Dosen Universitas Bina Bangsa	Masyarakat Dukuh

Sumber: Jadwal PKM Universitas Bina Bangsa Tahun 2023

Kegiatan ini menurut tabel diatas merupakan dari pada agenda yang dilakukan oleh dosen dan mitra serta masyarakat setempat dalam bentuk kolaborasi kegiatan pada pengabdian kepada masyarakat. Penguatan Kerjasama dan Jaringan mitra, melalui kolaborasi pengabdian kepada masyarakat, terjalin kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi dan mitra masyarakat (Laksana, 2023). Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan manfaat yang ada pada Badan Usaha Desa, sehingga dapat memberikan kemandirian masyarakat untuk bisa mendapatkan keuntungan yang dirasakan oleh orang banyak.

Penyuluhan Sosialisasi Komprehensif Pembentukan BUMDes dalam Pandangan Perspektif Ekonomi Dan Manajemen

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan (Harahap et al., 2022). Dalam konteks ekonomi, pembentukan BUMDes adalah langkah penting untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang berada di luar desa. Sosialisasi ini harus mencakup pemahaman tentang diantaranya, sebagai berikut: 1) Diversifikasi pendapatan, bagaimana BUMDes dapat berperan dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan, atau jasa lainnya untuk menciptakan peluang kerja dan pendapatan tambahan; 2) Pengelolaan sumber daya, bagaimana BUMDes dapat mengelola sumber daya alam dan manusia dengan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi dan ekonomi desa; 3) Akses keuangan, bagaimana BUMDes dapat mengakses sumber daya

keuangan, termasuk dana desa, pinjaman bank, atau bantuan pemerintah, untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang dikelola oleh BUMDes.

Sedangkan, dalam perspektif manajemen sosialisasi ini menyoroti bagaimana BUMDes akan diorganisasikan dan dioperasikan. Pandangan ini tidak terlepas dari pada unsur oragnisasi yang dijalankan oleh para pengelola BUMDes diantaranya seperti: 1) Struktur organisasi, bagaimana BUMDes akan didirikan, dengan susunan kepengurusan yang jelas, seperti dewan pengurus, manajer, dan staf operasional; 2) Perencanaan dan pengelolaan proyek, bagaimana BUMDes akan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola proyek-proyek ekonomi, serta bagaimana akan mengukur kinerja dan keberlanjutan proyek tersebut; 3) Sumber daya manusia, bagaimana BUMDes akan melibatkan dan melatih anggota desa, baik yang terlibat langsung dalam operasi BUMDes maupun yang berperan sebagai konsumen atau pemegang saham. Selain itu juga, dalam pandangan perspektif regulasi Hukum sosialisasi menyoroti peraturan dan regulasi yang berlaku untuk BUMDes, termasuk diantaranya: 1) Pendaftaran dan legalitas, proses pendaftaran BUMDes sesuai dengan hukum setempat, termasuk persyaratan perpajakan, izin usaha, dan pengaturan hukum lainnya yang harus diikuti; 2) Tata kelola, bagaimana BUMDes akan diawasi dan diatur, termasuk masalah seperti pelaporan keuangan, audit, dan pengungkapan informasi yang relevan; 3) Hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban anggota BUMDes, serta mekanisme untuk memutuskan hal-hal penting seperti alokasi laba, perubahan anggaran, dan pemilihan manajemen BUMDes. Sosialisasi komprehensif yang mencakup aspek-aspek di atas akan membantu memastikan bahwa BUMDes di Desa Dukuh dapat berjalan efektif dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal, dikelola secara baik, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini akan memberikan dasar yang kuat untuk keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuannya yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.



Gambar 2. Penyampaian Narasumber Dari Aspek Ekonomi

Berdasarkan pandangan para akademisi dimana disampaikan oleh bapak Kenedi selaku dosen ekonomi dan merupakan mahasiswa doktoral Universitas Padjajaran menjelaskan sosialisasi komprehensif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif ekonomi adalah proses informasi dan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana BUMDes dapat berkontribusi pada perkembangan ekonomi di tingkat desa diantaranya, sebagai berikut: 1) Tujuan dan Manfaat Ekonomi BUMDes: memaparkan dengan jelas tujuan dan manfaat ekonomi dari pembentukan BUMDes. Ini meliputi peningkatan pendapatan masyarakat desa, penciptaan lapangan kerja lokal, diversifikasi ekonomi desa, dan peningkatan akses terhadap layanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat; 2) Potensi Ekonomi Desa: Sosialisasi harus menggambarkan potensi ekonomi desa, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, dan keterampilan lokal. Ini akan membantu anggota desa memahami bagaimana BUMDes dapat mengoptimalkan aset-aset ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 3) Model Bisnis BUMDes: Penjelasan tentang model bisnis BUMDes harus mencakup jenis-jenis usaha yang dapat didirikan oleh BUMDes, sumber pendapatan yang potensial, dan strategi pengembangan usaha. Ini juga perlu memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari usaha-usaha tersebut; 4) Sumber Pendanaan: mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang mungkin tersedia untuk BUMDes, seperti dana desa, pinjaman bank, atau bantuan pemerintah. Anggota desa perlu memahami cara mengakses dan mengelola sumber daya keuangan ini untuk mendukung inisiatif ekonomi BUMDes; 5) Pengelolaan Risiko dan Keberlanjutan: Pengelolaan risiko dalam bisnis BUMDes dan strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Hal ini mencakup pemahaman tentang perencanaan keuangan, pengelolaan stok, dan adaptasi terhadap perubahan pasar atau kondisi ekonomi; 6) Partisipasi Masyarakat: Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan BUMDes bergantung pada partisipasi

aktif masyarakat desa. Sosialisasi harus mempromosikan ide bahwa anggota desa memiliki peran dalam mengembangkan, mendukung, dan mengawasi kegiatan BUMDes.

Penyuluhan Sosialisasi Komprehensif Pembentukan BUMDes dalam Pandangan Perspektif Regulasi Hukum



Gambar 3. Penyampaian Narasumber Dari Aspek Regulasi Hukum

Selain itu, pembahasan sosialisasi komprehensif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif regulasi hukum adalah langkah penting untuk memastikan bahwa BUMDes di Desa Dukuh beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam pandangan perspektif regulasi Hukum yang dijelaskan oleh bapak Faturohman yang merupakan praktisi Hukum yang dimana sebagai akademisi juga dosen dari Universitas Bina Bangsa menjelaskan beberapa hal penting dalam sosialisasi ini untuk pembentukan BUMDes memiliki beberapa aspek yang harus dimiliki diantaranya, sebagai berikut penjelasannya: 1) Pemahaman Atas Hukum yang Berlaku: Pada sosialisasi ini menjelaskan kepada anggota desa tentang hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pendirian dan operasional BUMDes. Ini mencakup undang-undang dan peraturan nasional, provinsi, serta peraturan khusus yang mungkin berlaku di tingkat desa atau kabupaten; 2) Proses Pendirian BUMDes: Penjelasan ini mengenai proses formal pendirian BUMDes, termasuk persyaratan hukum, dokumen yang diperlukan, dan prosedur administratif yang harus diikuti. Hal ini melibatkan proses perizinan, pembentukan dewan pengurus, dan registrasi legalitas BUMDes; 3) Tata Kelola Internal: Sosialisasi ini juga memaparkan bagaimana tata kelola internal BUMDes harus disusun sesuai dengan hukum. Ini mencakup pengaturan kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan peraturan tentang penggunaan dana dan aset BUMDes; 4) Aspek Perpajakan: Penjelasan mengenai aspek perpajakan yang relevan seperti pemahaman tentang kewajiban pajak BUMDes, pelaporan pajak, dan cara mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku; 5) Pengaturan Keuangan: Sosialisasi ini membahas bagaimana BUMDes akan mengelola dan melaporkan keuangan sesuai dengan hukum. Ini termasuk pelaporan keuangan tahunan, audit, dan pemenuhan regulasi perbankan jika BUMDes melakukan transaksi keuangan; 6) Perlindungan Hukum BUMDes: Anggota desa perlu memahami hak dan perlindungan hukum yang diberikan kepada BUMDes. Ini mencakup hak atas aset dan kebijakan yang mengatur perlindungan BUMDes dari tindakan ilegal atau pemengaruh eksternal yang merugikan; 7) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Sosialisasi juga memberikan pemahaman tentang pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan BUMDes. Ini termasuk pihak-pihak yang berwenang untuk mengawasi BUMDes dan konsekuensi jika BUMDes melanggar hukum; 8) Pembaruan Hukum dan Perubahan Regulasi: Informasi tentang pentingnya mengikuti pembaruan hukum dan perubahan regulasi yang berlaku untuk BUMDes. Hal ini memastikan bahwa BUMDes selalu berada dalam kepatuhan hukum.

Evaluasi Kegiatan

Pada kegiatan ini yang dilakukan oleh mahasiswa dan para akademisi serta mitra dalam melakukan pengabdian masyarakat, untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa Dukuh untuk bisa memiliki BUMDes, dimana salah satu langkah bukti nyata yang senantiasa para akademisi dan mitra peduli akan pertumbuhan yang ada di desa Dukuh. Kegiatan pembahasan sosialisasi komprehensif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari perspektif ekonomi, manajemen, dan regulasi hukum di Desa Dukuh adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan BUMDes tercapai secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi dapat mencakup pengukuran peningkatan pendapatan di tingkat desa sebagai hasil dari kegiatan BUMDes. Evaluasi akan memeriksa apakah struktur organisasi BUMDes berfungsi dengan baik, apakah dewan pengurus memiliki peran yang jelas, dan bagaimana keputusan dibuat dan diimplementasikan. memeriksa apakah ada upaya yang signifikan dalam pengembangan kapasitas anggota desa dan pengurus

BUMDes dalam mengelola usaha dan program BUMDes. Hasil evaluasi dari kegiatan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana pengetahuan masyarakat akan BUMDes di Desa Dukuh untuk manfaat dalam mencapai tujuan ekonomi, manajemen, dan kepatuhan hukum yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Pentingnya suatu masyarakat desa untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa demi pertumbuhan suatu desa yaitu di desa Dukuh Kragilan yang kawasan desa yang sangat luas dan potensi akan kawasan industri. Dimana potensial usaha yang bisa dikembangkan di daerah tersebut mampu memberikan pemasukan pada pertumbuhan ekonomi di desa Dukuh. Beberapa aspek yang diberikan pemahaman secara jelas dalam penyuluhan ini dalam sosialisasi pembentukan BUMDes di desa Dukuh. Dapat dilihat dari beberapa manfaat dan ditinjau secara aspek ekonomi, manajemen dan regulasi hukum yang berlaku. Kegiatan ini pula menjadikan satu kemandirian dan usaha daripada mahasiswa, dosen serta mitra yang tergabung dalam pengabdian masyarakat untuk sebuah tridharma pendidikan dan perkembangan yang ada di masyarakat agar bisa lebih maju.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang bisa diberikan untuk kegiatan ini dalam pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan BUMDes bagi desa Dukuh. Agar bisa diberikan pendampingan untuk pembuatan syarat dan prasyarat yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Dukuh, serta diberikan pelatihan untuk pengelola agar bisa memahami struktur organisasi yang terbentuk dalam BUMDes. Memahami aspek dan regulasi hukum yang berlaku dalam pembentukan BUMDes. Masyarakat harus berperan aktif dalam kemajuan BUMDes apabila sudah terbentuk dan berjalan di desa Dukuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada LPPM Universitas Bina Bangsa yang telah memfasilitasi para dosen dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di tahun 2023 dan ucapan terima kasih kepada yang utama kepada mitra yaitu Kantor Desa dan jajaran pemerintahan desa yang telah membantu dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dalam memberikan pembelajaran yang berharga untuk untuk masyarakat dalam mengambil peluang usaha di desa, agar menjadi desa yang mandiri dan maju di Kecamatan Kragilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amroni, A., Asfi, M., Suwandi, S., Kusnadi, K., Purnamasari, D. L., & Pranata, S. (2021). Pengabdian Masyarakat Bakti Sosial Berbagi Paket “Nasi Pahlawan” Peduli Covid-19 Di Graha Yatim Dan Dhuafa Kota Cirebon. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 296. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6016>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–167.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pongok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/Rab.040152>
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.56644/Adl.V1i1.4>
- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Pebriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mediteg*, 3(1). <https://doi.org/10.34128/Mediteg.V3i1.35>
- Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/10.15575/Km.V1i1.9698>
- Harahap, H., Febriani, E., Yusuf, M., Ardhiyanti, T., Ilmu, F., Universitas, K., & Unggul, E. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Di Lingkungan Anak-

- Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Pcm Srengseng.
- Irwan Sapta Putra Et Al. (2023). The Legal Aid For Underprivileged People In Indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3), 1717–1722. <https://doi.org/10.52783/Rlj.V11i3.1933>
- Khotimah, H. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Studi Di Bumdes Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon). *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33603/Hermeneutika.V3i2.2596>
- Laksana, April; Fitrianti, Rizqi; Humadi, A. (2022). Sosialisasi Pengembangan Media Dalam Pemanfaatan Tv Digital Di Desa Banyumas. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 153–158. <https://doi.org/10.55883/Jipam.V1i3.2>
- Laksana, A. (2023). Sinergitas Senabung Dan Mitra Pada Kegiatan Sosial Di Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, 3(2), 408–425. <https://doi.org/10.53363/Bw.V3i2.197>
- Masriyadi, M., Isnarini, E., Naibaho, Y. B., Sari, J., & Laksana, A. (2023). Minat Belajar Anggota Serikat Pekerja Nasional Dalam Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Diri (Studi Kasus Mahasiswa Kelas Malam Spn Di Universitas Bina Bangsa Bangsa). *Journal On Education*, 5(3), 10053–10063. <https://doi.org/10.31004/Joe.V5i3.1888>
- Nova, K., & Arwanto, A. (2021). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tinting Boyok, Sekadau, Kalimantan Barat. *Civitas Consecratio: Journal Of Community Service And Empowerment*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.33701/Cc.V1i1.1774>
- Saepulloh, Asep & Laksana, A. (2022). Development Of Education And Training Program Dpc Spn Dnature Improves Human Resources On The Quality Of Job Life For Trade Union Members In Serang Regency Companies. *Sean Institute Jurnal Ekonomi*, 11(2), 995–1000.
- Sari, N., Yuniarti, Y., Imastary Tan, M., Ikhsan Syukri, A., & S, R. A. (2022). Sosialisasi Pembentukan Bumdes Untuk Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Di Desa Pasar Kerman Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 4(1), 24–27. <https://doi.org/10.22437/Jitdm.V4i1.19540>
- Satoto, S., Syarif, A., Noviades, D., Fitria, F., & Mushawirya, R. (2019). Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 182–190. <https://doi.org/10.22437/Jkam.V3i2.8483>
- Setiono, H., & Dwihandoko, T. H. (2019). Sosialisasi Dan Pelatihan Pendirian Bumdes Bagi Pengelola Bumdes Di Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. *Abdimas Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–47.
- Susilowati, N., Anisykurlillah, I., Asrobin, M., Mahmud, A., Rahmawati, E., & Ananda, D. S. (2021). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Arto Desa Kenteng. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 175–180. <https://doi.org/10.15294/Abdimas.V25i2.33360>
- Thalib, P., Wisudanto, W., Putri, T. V., & Kholiq, M. N. (2022). Bantuan Sosial Sedekah Nasi Bungkus Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pusat Pengelolaan Dana Sosial. *Abdi Moestopo: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/10.32509/Abdimoestopo.V5i1.1845>
- Winisudo, R. T., & Sadewo, F. X. S. (2021). Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sidokepong, Sidoarjo. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/Jt.V4i2.12467>